



**2024**

**RENJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**GEDUNG EKS MULTIYEARS LANTAI I JL. SWARNA BUMI  
TELP.(0768) 22105 ; (0768) 21093  
EMAIL : [diskopumkm@inhilkab.go.id](mailto:diskopumkm@inhilkab.go.id)  
WEBSITE : [diskopumkm.inhilkab.go.id](http://diskopumkm.inhilkab.go.id)  
T E M B I L A H A N**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dapat terselesaikan.

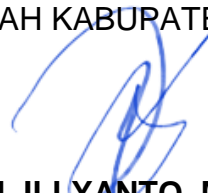
Penyusunan Renja PD Tahun 2024 disusun agar pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD, lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Renja ini merupakan acuan dalam mengusulkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024 yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur secara berkesinambungan.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat memberikan berbagai informasi yang diperlukan dan kami menyadari bahwa Penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna baik dalam penyajian maupun substansi materi yang ada. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya kepada semua pihak yang telah bersama-sama membantu dan mendukung dalam penyusunan dokumen ini.

Tembilahan, Agustus 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



**Ir. H. ILLYANTO, MT**

NIP. 19650101 199303 1 014

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	35
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	42
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR GAMBAR/TABEL

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir .....	2
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir.....	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir ..	21
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir .....	24
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 .....	43
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

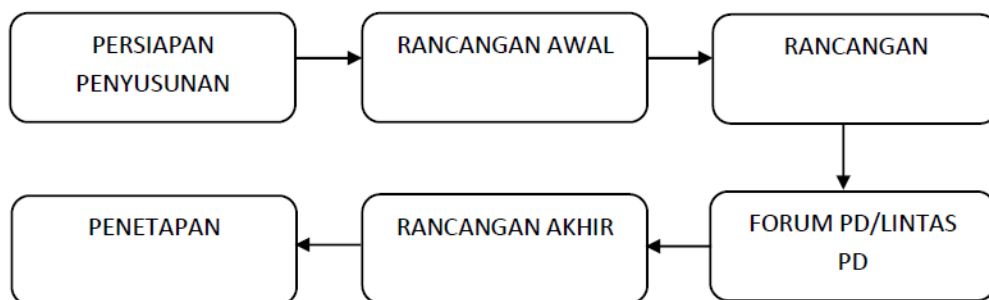
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan.
  - Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024
  - Pengumpulan materi ( hasil evaluasi renja 2022, pengendalian kegiatan tahun 2023, dan RKPD 2024)
2. Penyusunan rancangan awal
  - Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana dan pengampu kepentingan.
  - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan.

- Sinkronisasi dan Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024.
  - Masukan dari pelaksana kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Me Kabupaten Indragiri Hilir
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
    - Melaksanakan FGD dengan mengundang : DPRD, OPD terkait, Perguruan Tinggi , dan Pemangku Kepentingan yang terkait lainnya.
  5. Perumusan rancangan akhir
    - Penyempurnaan Dokumen
  6. Penetapan

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir



Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir adalah penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir 2024 – 2026 serta mengacu pada Rencana Kerja. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang

direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengingat beberapa hal sebagai berikut: Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024.
- 2) Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Rebpulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.
17. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagai acuan dan tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 yang sesuai tugas, pokok, dan fungsi.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024;
2. Mengelola upaya – upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target – target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Renja tahun 2022 dan Renstra hingga tahun 2023;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 1.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Sedangkan realisasi hasil pelaksanaan program kegiatan Tahun 2022 dapat diuraikan berdasarkan hasil / keluaran beserta targetnya dengan rincian laporan kinerja Perangkat Daerah dengan pokok-pokok materi antara lain :

- 1) Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang **tidak memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Persentase koperasi aktif dan target indikator tersebut adalah 90% dan telah terealisasi sebesar 67,71%.
  - o Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Jumlah Koperasi Yang Di Monev dan jumlah target 40 Koperasi dan terealisasi 30 Koperasi.
- 2) Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang **tidak memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dengan indikator Jumlah KSP/USP koperasi Sehat dan target indikator tersebut adalah 40 Koperasi dan telah terealisasi sebesar 12 Koperasi dengan capaian kinerja 30%.
  - o Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota : Indikator Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang Dilakukan Penilaian, target : 90%, Realisasi 31,62%.

- o Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Indikator : Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai, Target : 60 Koperasi, terealisasi : 37 Koperasi

3) Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang **tidak memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase UMKM aktif dan target indikator tersebut adalah 90% dan telah terealisasi sebesar 78,03%.

4) Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Target	Realisasi	Uraian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Tersedianya administrasi dan sarana prasarana aparatur perkantoran
(1)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100 Persen	100 Persen	Tersusunnya pelaporan aset dan keuangan yang disusun sesuai standar
		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 Persen	100 Persen	Tersusunnya pelaporan aset dan keuangan yang disusun sesuai standar
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	27 Orang	27 orang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang diberikan
(2)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	Terpelihara aset dan barang kantor
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan	100 Persen	100 Persen	Terbayarnya jasa keamanan kantor sebanyak 3 orang, dikarenakan 1 orang mengundurkan diri.
(3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	Terlaksananya sarana prasarana administrasi perkantoran yang baik
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 Persen	100 Persen	Tersedianya ATK dan peralatan Kebersihan kantor
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Tersedianya bahan logistik kantor, yakni

					BBM dan Makan dan Minum rapat kantor
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	Barang cetak, spanduk, brosur, leaflet, baliho, amplop dinas, cetak map dinas, papan ucapan, penggandaan
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Media Online yang disediakan	12 Eksemplar	12 Eksemplar	Belanja langganan bahan bacaan surat kabar/koran 12 mass media
		Jumlah Bahan bacaan dan Media Online yang disediakan	17 Media Online	16 Media Online	16 media online yang lolos verifikasi dan memenuhi syarat untuk melakukan kerjasama
(4)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100 Persen	100 Persen	Tersedianya jasa penunjang operasional kantor
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	100 Persen	100 Persen	Kebutuhan surat menyurat yang terpenuhi yakni materai
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3 Rekening	3 Rekening	Rekening yang terbayarkan, yaitu Telepon, Listrik dan Internet Indihome
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	100 Persen	100 Persen	Hanya 21 orang jasa pelaksana yang di bayarkan, 1 orang mengundurkan diri
(5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara yang dipelihara dan dipepanjang perizinannya (Roda 4 dan Roda 2)	100 Persen	100 Persen	Ada 6 Unit kendaraan dinas tidak dibayarkan karena kendaraan tersebut tidak layak pakai
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 Persen	100 Persen	Pemeliharaan Peralatan komputer, printer
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 Persen	100 Persen	Pemeliharaan / Service AC
14	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	30 Koperasi	30 Koperasi	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan terhadap 30 Koperasi
16	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat penghargaan melalui pelaksanaan RAT tepat waktu	10 Koperasi	10 Koperasi	Ada 10 Koperasi yang diberikan sertifikat penghargaan
17	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Perkoperasian	30 Orang	30 Orang	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan manajemen perkoperasi dengan peserta 30 Koperasi/anggota
19	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Sosialisasi Permodalan melalui KUR dan Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	30 Orang	30 Orang	Terlaksananya kegiatan sosialisasi permodalan bagi pelaku usaha mikro yang bermitra

20	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi P-IRT dan Halal	60 Orang	60 Orang	Terlaksananya kegiatan sosialisasi P-IRT 30 Orang dan Sosialisasi Halal 30 Orang
21	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dan Kelompok UMKM yang di Fasilitasi	14 UMKM	14 UMKM	Ada 14 Kelompok UMKM yang di Fasilitasi
22	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	10 Dokumen	RKA,DPA,DPPA, LKJIP, LPPD-LKPJ dan IKK, RKT, RENJA, RENSTRA, Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Monev Kinerja Program dan Kegiatan
(10)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	1 Persen	1 Persen	Tingginya perkembangan usaha kecil atau UMKM ini juga didasarkan pada kondisi pandemi yang membuat banyak masyarakat merubah pola konsumsi

5) Realisasi program/kegiatan yang **melebihi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

IV.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Berdaya saing	70,68 Persen	71,5 Persen	Anggota Koperasi yang mendapat pendidikan dan latihan perkoperasian
(9)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru Yang Mandiri	90 Persen	90,36 Persen	Peningkatan Wirausaha baru, pembuatan Izin Usaha dimudahkan dengan izin berbasis tunggal, NIB (Nomor Induk Berusaha), yang memudahkan bagi pelaku usaha menengah dan besar untuk bermitra
18	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem ODS	5001 Usaha Mikro	7321 Usaha Mikro	Meningkatnya data usaha mikro yang di input dalam sistem ODS, ini terjadi di kala pandemi usaha mikro tumbuh positif sejalan

					dengan upaya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan (Banpres/BPUM ) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19.
21	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dan Kelompok UMKM yang di Fasilitasi	40 Dokumen	328 Dokumen	Meningktanya pembuatan NIB bagi kelompok UMKM, karena pelaku Usaha Mikro dapat dengan mudah membuat/mendapatkan Izin berusaha/NIB
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset UMKM	2 Persen	30,3	Terjadi peningkatan Omset UMKM di masa pandemi Covid-19 karena UMKM menggunakan digital marketing untuk mempromosikan penjualannya serta meningkatkan kualitas produk dan layanan penjualan
23	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Kelompok Usaha Mikro yang di fasilitasi	3 kelompok UKM	13 Kelompok UMKM	Ada 13 Kelompok UMKM yang di Fasilitasi, Karena dilihat dari potensi UMKM mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.



- 6) Faktor-faktor pendorong, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
- Program Terpenuhinya Target : Penerapan kebijakan untuk memantapkan dan lebih mendorong optimalisasi sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.
  - Program Melebihi Target : - Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan intensif - Ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- 7) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Kerja Perangkat Daerah; Memperhatikan pencapaian target Program yang sebagian besar telah terpenuhi bahkan melebihi target, maka diharapkan pengambilan kebijakan dan penyediaan anggaran dapat mendorong pelaksanaan kegiatan dengan melakukan berbagai inovasi, sehingga kedepan perkembangan ekonomi serta kegiatan perkoperasian, usaha mikro dan perdagangan menjadi lebih baik serta mampu tampil dan bersaing tidak hanya di tingkat lokal tetapi nasional bahkan internasional.
- 8) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Dari hasil perencanaan dan penganggaran yang perlu dilaksanakan adalah mempunyai suatu perencanaan baik jangka menengah maupun jangka panjang untuk menjawab kegiatan yang berkembang dalam era digitalisasi saat ini.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian  
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program, kegiatan dan Sub kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Kegiatan/sub kegiatan) s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2022			Target program ,Kegiatan, Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	80,8	95,2	0	0	#DIV/0!	80,8	176	217,82
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	80,8	0	0	0	#DIV/0!	80,8	80,8	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80,8	0	0	0	#DIV/0!	80,8	80,8	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,8	0	0	0	#DIV/0!	80,8	80,8	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	86	100	99	99	100	285	285,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	28	27	27	100	30	85	283,33
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	100	90	100	100	100	100	290	290,00

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	4	4	4	3	75	4	11	275,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik					#DIV/0!	-	0	#DIV/0!
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	1	1	0	0	#DIV/0!	1	2	200,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100	100	100	99	99	100	299	299,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	29	50	43	86	12	84	700,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2	3	2	2	100	2	7	350,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8	4	2	2	100	8	14	175,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	36	300,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328	73	348	245	70,4	328	646	196,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100	100	100	100	100	100	300	300,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan kebutuhan surat menyurat	100	100	100	100	100	100	300	300,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3	3	3	3	100	3	9	300,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan	21	5	22	21	95,5	21	47	223,81
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	96	96	100	296	296,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lap yang dipelihara dan diperpanjang perizinannya (Roda 4 dan Roda 2)	28	28	28	22	78,6	28	78	278,57
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	37	37	37	24	64,9	37	98	264,86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	17	17	17	8	47,1	17	42	247,06
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan rekomendasi teknis Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	33	3	0	0	#DIV/0!	33	35,92	108,85
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang Direkomendasikan	100	2,92	0	0	#DIV/0!	100	102,92	102,92
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi yang direkomendasikan	20	20	0	0	#DIV/0!	20	40	200,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan di periksa	53	0	90	67	74,4	53	120	226,42
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Di-monitoring dan Dievaluasi	30	40	40	30	75	30	100	333,33

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30	2	0	0	#DIV/0!	30	32	106,67
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	15	9	30	30	100	15	54	360,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	65	80	40	12	30	65	157	241,54
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi Kriteria Penilaian	50	80	90	31	34,4	50	161	322,00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam yang dinilai	60	0	60	37	61,7	60	97	161,67
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan melalui pelaksanaan RAT tepat waktu	3	3	10	10	100	3	16	533,33
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan Koperasi yang memiliki Kompetensi berdaya saing	78	80	70	71	101,4	78	229	293,59
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Dilaksanakan	20	20	90	30	33,3	20	70	350,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang dilaksanakan	20	20	30	30	100	20	70	350,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan Usaha Mikro yang didata dan difasilitasi	72	100	90	78	86,7	72	250	347,22

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Terdaftar dalam Online Data System (ODS)	72	100	90	90	100,4	72	262,36	364,39
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam online data system (ODS)	5000	20	5001	7321	146,4	5000	12341	246,82
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang bermitra	15	30	30	30	100	15	75	500,00
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100	20	60	60	100	100	180	180,00
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah sosialisasi pengembangan usaha mikro yang dilaksanakan	10	21	14	14	100	10	45	450,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Skala UMKM yang meningkat	1407	2	2	30	1500	1407	1439	102,27
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	15	35	1	1	100	15	51	340,00
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah kelompok usaha mikro yang difasilitasi	25	3	3	13	433	25	41	164,00

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Kinerja Pelayanan Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam evaluasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dinas dituntut untuk selalu berkembang dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Pengolahan data dalam jumlah banyak, serta adanya perubahan yang bersifat rutin dan berulang-ulang, sering menimbulkan kesulitan dalam penyediaan informasi.

Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”, oleh karenanya koperasi juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan jenis indikator yang dikaji sesuai dengan tolak ukur dan indikator pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragir Hilir serta sesuai dengan tugas fungsi, bersama ini disampaikan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah :



Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan  
Menengah Kabupaten Indragiri Hilir

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI						TARGET			Akhir Periode
				2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024	2025	2026	
1	Persentase UMKM dan Koperasi yang Naik Skala Usaha	Persen	Jumlah pertumbuhan volume usaha Koperasi dan volume Usaha Mikro tahun (n) dikurang jumlah pertumbuhan volume usaha Koperasi dan volume Usaha Mikro tahun lalu (n-1) dibagi dengan Jumlah volume usaha Koperasi dan jumlah volume Usaha Mikro keseluruhan dikali seratus persen	0,00	0,00	0,00		61,78	61,78	63,00	65,00	67,00	67,00
2	Persentase Koperasi yang aktif	Persen	Jumlah Koperasi aktif tahun (n) dikurang jumlah Koperasi aktif tahun lalu (n-1) dibagi dengan Jumlah Koperasi aktif keseluruhan di kali seratus persen	66,05	66,20	67,00	67,00	67,70	67,70	70,00	72,00	75,00	75
3	Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah baru	Persen	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha tahun (n) dikurang jumlah usaha mikro tahun sebelumnya (n-1) dibagi dengan Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan dikali seratus persen	97,93	99,92	0	0,27	90,36	90,36	77,00	80,00	83,00	83
4	Nilai Evaluasi RB Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit	Nilai	Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				18	29,79	29,79	32	33	35	35
5	Nilai AKIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil	Prediket	Evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah				61,69	70,65	70,65	BB (73)	BB (76)	BB (79)	BB (79)

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Development Goals)
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan; 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana terdapat pergeseran dan penambahan anggaran Pokir DPR pada anggaran kegiatan rancangan awal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024  
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Indragiri Hilir

NO	KODE	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan								
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH						6.388.212.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH						10.703.712.000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.388.212.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.703.712.000	
	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						6.388.212.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						10.703.712.000	
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	5.586.919.605	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	6.553.920.550			
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	170.263.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	170.263.000			
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
				<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Dokumen	5 Dokumen	105.869.500			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Dokumen	5 Dokumen	105.869.500			
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
				<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Laporan	3 Laporan	64.393.500			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Laporan	3 Laporan	64.393.500			
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	3.943.216.740	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	3.943.216.740			
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

				<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Orang/Bulan	55 Orang/bulan	3.943.216.740			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Orang/Bulan	55 Orang/bulan	3.943.216.740	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-	54.780.400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	54.780.400	
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
				<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Dokumen	2 Dokumen	4.186.000			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Dokumen	2 Dokumen	4.186.000	
2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
				<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Dokumen	4 Dokumen	50.594.400			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Dokumen	4 Dokumen	50.594.400	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-	127.090.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	127.090.000	
2.17.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
				<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	Unit	2 Unit	15.840.000			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	Unit	2 Unit	15.840.000	
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
				<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Paket	30 Paket	30.000.000			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Paket	30 Paket	30.000.000	
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
				<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Orang	13 Orang	81.250.000			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Orang	13 Orang	81.250.000	

2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	654.120.665	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	1.621.121.610	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	2.288.850			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	2.288.850	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7 Paket	133.297.550			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7 Paket	133.297.550	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	53.200.000			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	53.200.000	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8 Paket	22.240.210			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8 Paket	22.240.210	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	40.400.000			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	690.400.000	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	348 Laporan	402.694.055			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	348 Laporan	719.695.000	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	146.560.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	146.560.000	

		Urusan Pemerintah Daerah						Urusan Pemerintah Daerah					
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
				<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	Unit	5 Unit	146.560.000			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	Unit	5 Unit	146.560.000
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	433.958.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	433.958.800
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
				<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Laporan	50 Laporan	550.000			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Laporan	50 Laporan	550.000
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
				<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Laporan	3 Laporan	112.848.000			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Laporan	3 Laporan	112.848.000
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
				<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Laporan	3 Laporan	320.560.800			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Laporan	3 Laporan	320.560.800
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	56.930.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	56.930.000
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
				<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara</i>	Unit	22 Unit	36.270.000			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang</i>	Unit	22 Unit	36.270.000

				<i>dan dibayarkan Pajaknya</i>						<i>Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
				<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Unit	37 Unit	9.290.000			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Unit	37 Unit	9.290.000	
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
				<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi</i>	Unit	1 Unit	11.370.000			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi</i>	Unit	1 Unit	11.370.000	
2	2.17.02	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Kab. Indragiri Hilir</b>	-		-	<b>36.771.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Kab. Indragiri Hilir</b>	-		-	<b>36.771.000</b>	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	20.011.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	20.011.000	
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota												
				<i>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Unit Usaha	35 Unit Usaha	20.011.000			<i>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Unit Usaha	35 Unit Usaha	20.011.000	



	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	16.760.000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	16.760.000	
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota												
				<i>Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Unit Usaha	1 Unit Usaha	16.760.000			<i>Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Unit Usaha	1 Unit Usaha	16.760.000	
3	2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	<b>25.394.000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	<b>125.394.000</b>	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	25.394.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	125.394.000	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi												

				<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>	Unit Usaha	15 Unit Usaha	13.205.000			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>	Unit Usaha	15 Unit Usaha	63.205.000	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota												
				<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	Unit Usaha	30 UnitUsaha	12.189.000			<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	Unit Usaha	30 UnitUsaha	62.189.000	
4	2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Kab. Indragiri Hilir	-			28.187.000	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Kab. Indragiri Hilir	-			128.187.000	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	28.187.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	128.187.000	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota												
				<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>		30 Unit Usaha	14.322.000			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>		30 Unit Usaha	64.322.000	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan												
				<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>		3 Unit Usaha	13.865.000			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>		3 Unit Usaha	63.865.000	
5	2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Kab. Indragiri Hilir	-	78%	-	50.059.850	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Kab. Indragiri Hilir	-	78%	-	350.059.850	

	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	50.059.850	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	350.059.850	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi												
				<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	Orang	60 Orang	50.059.850			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	Orang	60 Orang	350.059.850	
6	2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Kab. Indragiri Hilir	-	Koperasi	19 Koperasi	35.349.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Kab. Indragiri Hilir	-	Koperasi	19 Koperasi	310.838.055	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	35.349.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	310.838.055	
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota												
				<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya</i>	Unit Usaha	25 Unit Usaha	35.349.000			<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya</i>	Unit Usaha	25 Unit Usaha	85.348.875	
	2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota												
				<i>Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha				<i>Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha	50.000.000	
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota												
				<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha				<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha	86.100.850	
	2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota												
				<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha				<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha	50.000.000	
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota												

				<i>Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Unit Usaha	20 Unit Usaha				<i>Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Unit Usaha	20 Unit Usaha	39.388.330	
7	2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Kab. Indragiri Hilir</b>	-		-	401.531.545	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Kab. Indragiri Hilir</b>	-		-	<b>2.974.541.545</b>	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	401.531.545	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	2.974.541.545	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro												
				<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha	10.157.000			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha	10.157.000	
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro												
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha	27.123.945			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	Unit Usaha	30 Unit Usaha	27.123.945	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro												

				<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	Unit Usaha	40 UnitUsaha	254.000.000			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	Unit Usaha	40 UnitUsaha	2.827.010.000	
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro												
				<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	Orang	10 Orang	31.443.000			<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	Orang	10 Orang	31.443.000	
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil												
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	Unit Usaha	60 Unit Usaha	50.281.000			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	Unit Usaha	60 Unit Usaha	50.281.000	
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro												
				<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	Unit Usaha	5000 Unit Usaha	28.526.600			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	Unit Usaha	5000 Unit Usaha	28.526.600	
<b>8</b>	<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Kab. Indragiri Hilir</b>	-		-	<b>224.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Kab. Indragiri Hilir</b>	-		-	<b>224.000.000</b>	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	224.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	224.000.000	
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro												
				<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	Unit Usaha	15 Unit Usaha	224.000.000			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	Unit Usaha	15 Unit Usaha	224.000.000	
<b>J U M L A H</b>							<b>6.388.212.000</b>						<b>10.703.712.000</b>	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan hasil pemetaan serta mapping program/kegiatan tahun 2024 terdiri dari 8 program yang dijabarkan dalam 19 kegiatan dan 39 sub kegiatan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, meliputi 8 kegiatan, 21 sub kegiatan.
2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM, meliputi 2 kegiatan, 2 sub kegiatan.
3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI, meliputi 1 kegiatan, 2 sub kegiatan.
4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI, meliputi 1 kegiatan, 2 sub kegiatan.
5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN, meliputi 1 kegiatan, 1 sub kegiatan.
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, meliputi 1 kegiatan, 5 sub kegiatan.
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), meliputi 1 kegiatan, 6 sub kegiatan.
8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM, meliputi 1 kegiatan, 1 sub kegiatan.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang mengusulkan melalui Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai dengan tingkat Kabupaten, atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir. Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2024, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian renstra SKPD maupun terhadap RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel 2.4**  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Indragiri Hilir

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab.Inhil	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	40	
2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab.Inhil	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	40	
2.17.07.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab.Inhil	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	40	

1	Bantuan Peralatan Usaha Pertukangan Untuk Kelompok UMKM Cahaya Baru Desa Belantaraya Kecamatan Gaung	Baru Desa Belantaraya Kecamatan Gaung	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
2	Bantuan Peralatan Usaha Perbengkelan Untuk Kelompok UMKM Abid Motor Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh	elurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
3	Bantuan Peralatan Usaha Tenda dan Prasmanan Untuk Kelompok UMKM Lestari Desa Belantaraya Kecamatan Gaung	Desa Belantaraya Kecamatan Gaung	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
4	Bantuan Peralatan Usaha Pembuatan Maknan Ringan Untuk Kelompok UMKM Saga Jaya Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas	Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
5	Bantuan Peralatan Usaha Pembuatan Tahu Untuk Kelompok UMKM Harapan Kita Desa Belantaraya Kecamatan Gaung	Desa Belantaraya Kecamatan Gaung	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
6	Bantuan Peralatan Usaha Tenda dan Prasmanan Untuk Kelompok UMKM Sempurna Desa Belantaraya Kecamatan Gaung	Desa Belantaraya Kecamatan Gaung	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
7	Bantuan Peralatan Usaha Perbengkelan Untuk Kelompok UMKM Bengkel AW Jl. Baharuddin Yusuf Parit 12 Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan	Jl. Baharuddin Yusuf Parit 12 Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
8	Bantuan Peralatan Usaha Perbengkelan Untuk Kelompok UMKM Setia Motor Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh	Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
9	Bantuan Peralatan Usaha Catering Untuk Kelompok UMKM Rissa Catering Jl. Gerilya No. 15 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu	Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
10	Bantuan Peralatan Usaha Catering Untuk Kelompok UMKM Anugrah Inhil Jl. Prof. M. Yamin, Sh Lr. Cheri Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jl. Prof. M. Yamin, Sh Lr. Cheri Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
11	Bantuan Peralatan Usaha Advertising Untuk Kelompok UMKM Ges Advertising Jl. Terimas Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan	Jl. Terimas Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
12	Bantuan Peralatan Usaha Prasmanan Untuk Kelompok UMKM Benua Langkar Jl. Prof. M. Yamin, Sh Lr. Benua Langkar Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jl. Prof. M. Yamin, Sh Lr. Benua Langkar Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	



	13	Bantuan Peralatan Usaha Tenda dan Prasmanan Untuk Kelompok UMKM Irian Jl. Tanjung Harapan Lr. Tj. Irian Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kecamatan Gaung	Jl. Tanjung Harapan Lr. Tj. Irian Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kecamatan Gaung	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	14	Bantuan Peralatan Usaha Photocopy Untuk Kelompok UMKM Abi & Aidil Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka	Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	15	Bantuan Peralatan Usaha Memasak dan Resto untuk Kelompok UMKM Arsy Resto Jl. Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jl. Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	16	Bantuan Peralatan Usaha Pengolahan Bakso Untuk Kelompok UMKM Dewi Suwandi Jl. Pekan Arba Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan	Jl. Pekan Arba Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	17	Bantuan Peralatan Usaha Perbengkelan Untuk Kelompok UMKM Amal Motor Jl. Pekan Arba Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan	Jl. Pekan Arba Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	18	Bantuan Peralatan Usaha Perbengkelan untuk Kelompok UMKM Ai Auto Care Jl. Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Jl. Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	19	Bantuan Peralatan Usaha Sewa Tenda untuk Kelompok UMKM Tanjung Jl. Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Jl. Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	20	Bantuan Peralatan Usaha Printing Baju untuk Kelompok UMKM Berkah Konveksi jl. Batang Tuaka Lr. Abadi Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan	jl. Batang Tuaka Lr. Abadi Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	21	Bantuan Peralatan Usaha Pembuatan Kue untuk Kelompok UMKM Ummu Cake Jl. H. Sadri Lr. Ampera Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jl. H. Sadri Lr. Ampera Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	22	Bantuan Peralatan Usaha Sewa Tenda untuk Kelompok UMKM Ampera Jl. H. Sadri Lr. Ampera Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jl. H. Sadri Lr. Ampera Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	

	23	Bantuan Peralatan Usaha Pengolahan Bakso Untuk Kelompok UMKM Berkah Bersama Jl. Tanjung Harapan Lr. Tanjung Kilang Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Jl. Tanjung Harapan Lr. Tanjung Kilang Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	24	Bantuan Peralatan Usaha Sablon Untuk UMKM Putra Tunggal Jl. Prof. M. Yamin, SH Lr. Cherry Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jl. Prof. M. Yamin, SH Lr. Cherry Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	25	Bantuan Peralatan Usah Tenda dan Prasmanan Untuk Kelompok UMKM Harapan Baru Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas	Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	26	Bantuan Peralatan Usaha Laundry Untuk Kelompok UMKM Lokal Laundry Jl. Sungai Beringin Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Jl. Sungai Beringin Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	27	Bantuan Peralatan Usah Laundry Untuk Kelompok UMKM G Laundry Jl. M. Boya Lr. Sukun Kelurahan TembilahanKota Kecamatan Tembilahan	Jl. M. Boya Lr. Sukun Kelurahan TembilahanKota Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	28	Bantuan Peralatan Usaha Pembuatan Amplang Untuk Kelompok UMKM Majali Karya Jl. Propinsi Parit 3 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu	Jl. Propinsi Parit 3 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	29	Bantuan Peralatan Usaha Peras Santan Untuk Kelompok UMKM Jaya Lestari Jl. SKB Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Jl. SKB Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	30	Bantuan Peralatan Usaha Peras Santan untuk Kelompok UMKM Dedi Karya Jl. Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jl. Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	31	Bantuan Peralatan Usaha Pembuatan Kue untuk Kelompok UMKM Food Mood Jl. SKB Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Jl. SKB Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	32	Bantuan Peralatan Usaha Pembuatan Kue Untuk Kelompok UMKM Kue Berkah Bersama Jl. Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan	Jl. Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	33	Bantuan Peralatan Usaha Tenda dan Prasmanan Untuk Kelompok UMKM Siak Jl. H. Sadri Lr. Siak Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan	Siak Jl. H. Sadri Lr. Siak Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	

	Tembilahan	Tembilahan				
	34 Bantuan Peralatan Usaha Catering Untuk Kelompok UMKM Rayen Jl. Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilihan Hilir Kecamatan Tembilihan	Jl. Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilihan Hilir Kecamatan Tembilihan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	35 Bantuan Peralatan Usaha Rias Pengantin Untuk Kelompok UMKM Lasari Jl. Gerilya Gg. Nelayan Parit 6 Kelurahan Tembilihan Barat Kecamatan Tembilihan Hulu	Jl. Gerilya Gg. Nelayan Parit 6 Kelurahan Tembilihan Barat Kecamatan Tembilihan Hulu	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	36 Bantuan Peralatan Usaha Cafe & Resto Untuk Kelompok UMKM Konco Cafe & Resto Jl. Lingkar Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilihan	Jl. Lingkar Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilihan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	37 Bantuan Peralatan Usaha Perbengkelan Untuk Kelompok UMKM Gemilang Indragiri Service Jl. Gemilang Gg. Gemilang Indah Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilihan	Jl. Gemilang Gg. Gemilang Indah Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilihan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	38 Bantuan Peralatan Usaha Cucian Motor Untuk Kelompok UMKM Rezeki Kembar Jl. Gerilya Kelurahan Tembilihan Barat Kecamatan Tembilihan Hulu	Jl. Gerilya Kelurahan Tembilihan Barat Kecamatan Tembilihan Hulu	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	39 Bantuan Peralatan Usaha Tenda dan Prasmanan Untuk Kelompok UMKM Rosmawi Hadijah Jl. Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilihan Hilir Kecamatan Tembilihan	Jl. Prof. M. Yamin, SH Kelurahan Tembilihan Hilir Kecamatan Tembilihan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	
	40 Bantuan Peralatan Usaha Laundry Untuk Kelompok UMKM Bella Laundry Jl. Pangeran Hidayah Kelurahan Tembilihan Hilir Kecamatan Tembilihan	Jl. Pangeran Hidayah Kelurahan Tembilihan Hilir Kecamatan Tembilihan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Paket	1	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk pemulihan pasca Covid-19, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen RKP Tahun 2024, telah ditetapkan sasaran dan Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;

7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Proyek pembangunan harus sesuai dengan tema pembangunan, holistik dengan melibatkan sinergi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, integratif dengan memperhitungkan keterkaitan antar proyek dengan berbagai sumber pendanaan, serta berbasis spasial dengan lokasi yang jelas. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi optimal untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas nasional di masing-masing provinsi.

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan Tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2024 di samping mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 dan Visi pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024, juga mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2024, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2024 sesuai dengan tema yaitu “Mewujudkan Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-5 RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024, serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKPD tahun 2024 “Mewujudkan Riau yang berdaya saing, Sejahtera, Bermanfaat dan Unggul di Indonesia” untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) antara lain :

1. Daya Saing Daerah;
2. Kesejahteraan;
3. Bermartabat;
4. Unggul.

Adapun prioritas RKPD tahun 2024 yaitu;

1. Peningkatan Perekonomian;
2. Penguatan Infrastruktur;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
4. Pelestarian Lingkungan;
5. Kesejahteraan Sosial;

6. Ketenagakerjaan;
7. Pengamalan Nilai Keagamaan;
8. Pelestarian Budaya Melayu;
9. Peningkatan Pelayanan Publik;
10. Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam hal pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada penyusunan RKPD Provinsi Riau tahun 2024, pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Program Prioritas yang mendukung secara langsung terhadap hal sebagaimana dimaksud.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan tujuan sebagai berikut :

***“ Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing “***

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Usaha Koperasi; .
2. Meningkatnya Pelaku dan Daya Saing Usaha Mikro
3. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target 2024
<b>Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis unggulan daerah</b>	<b>Persentase UMKM dan Koperasi yang naik skala usaha</b>	Persen	63,00
<b>Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Koperasi dan UMKM</b>	Persentase Koperasi yang aktif	Persen	70,00
	Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah baru	Persen	77,00
<b>Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil</b>	<b>Nilai Evaluasi RB Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit</b>	Nilai	32
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil	Nilai AKIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil	Prediket	BB (73)

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/ kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2024 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

1. UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan di bidang koperasi dan UKM;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 .
4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
5. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 merupakan program/



kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan perencanaan anggaran.

2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 Program, 16 Kegiatan dan 40 Sub kegiatan yang diusulkan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif belanja langsung dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 sebesar Rp. 10.703.712.000,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur pelaksana urusan daerah di bidang koperasi dan Usaha Mikro menjalankan urusan wajib bukan pelayanan dasar berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dituangkan pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						10.703.712.000,00							6.573.747.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.703.712.000,00							6.573.747.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						10.703.712.000,00							6.573.747.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	81,5%			-	6.553.920.550,00						79,81%	5.863.936.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	73Nilai			-	170.263.000,00			-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	72Nilai	32.113.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	105.869.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	5 Dokumen	17.387.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			3 Laporan	64.393.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	3 Laporan	14.726.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	100Persen			-	127.090.000,00			-	Optimalisas i perindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat dalam rangka pen gentasan kemiskinan	-	100Persen	10.525.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disipln Pegawai	2 Unit			2 Unit	15.840.000,00	Kab. Inragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i perindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat dalam rangka pen gentasan kemiskinan	-	2 Unit	4.524.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket			30 Paket	30.000.000,00	Kab. Inragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i perindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat dalam rangka pen gentasan kemiskinan	-	32 Paket	2.394.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			13 Orang	81.250.000,00	Kab. Inragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i perindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat dalam rangka pen gentasan kemiskinan	-	4 Orang	3.607.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100Persen			-	1.621.121.610,00			-	Optimalisas i perindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat dalam rangka pen gentasan kemiskinan	-	100Persen	231.733.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			5 Paket	2.288.850,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	1 Paket	3.193.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket			7 Paket	133.297.550,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	14 Paket	16.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	53.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	2 Paket	12.010.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket			8 Paket	22.240.210,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	9 Paket	20.403.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	690.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	12 Dokumen	85.536.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378 Laporan			348 Laporan	719.695.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	358 Laporan	94.031.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0Unit			-	146.560.000,00			-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	0Unit	8.676.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit			5 Unit	146.560.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	0 Unit	8.676.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0Laporan			-	433.958.800,00			-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	0Laporan	70.611.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			50 Laporan	550.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	0 Laporan	450.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			3 Laporan	112.848.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas I perindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat dalam rangka pen gantasan kemiskinan	-	0 Laporan	16.242.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			3 Laporan	320.560.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas I perindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat dalam rangka pen gantasan kemiskinan	-	0 Laporan	53.919.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0Unit			-	56.930.000,00			-	Optimalisas I perindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat dalam rangka pen gantasan kemiskinan	-	0Unit	10.726.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit			22 Unit	36.270.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas I perindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat dalam rangka pen gantasan kemiskinan	-	0 Unit	7.295.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			37 Unit	9.290.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas I perindung an sosial dan pembe rdayaan masyarakat dalam rangka pen gantasan kemiskinan	-	0 Unit	1.880.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			1 Unit	11.370.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	-	0 Unit	1.551.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	45%			-	36.771.000,00						44%	32.114.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.011.000,00			-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	17.477.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				35 Unit Usaha	20.011.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-		17.477.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.760.000,00			-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	14.637.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit Usaha	16.760.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-		14.637.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	75%			-	125.394.000,00						73%	22.177.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	125.394.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	22.177.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				15 Unit Usaha	63.205.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-		11.532.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				30 Unit Usaha	62.189.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-		10.645.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	-	<b>49UMKM</b>			-	<b>128.187.000,00</b>						<b>16UMKM</b>	<b>24.617.000,00</b>	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	128.187.000,00			-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	24.617.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				30 Unit Usaha	64.322.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-		12.508.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				3 Unit Usaha	63.865.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-		12.109.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
d.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	78%			-	350.059.850,00						76%	43.825.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	350.059.850,00			-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	43.825.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	350.059.850,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-		43.825.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
e.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	19Koperasi			-	310.838.055,00						6Koperasi	30.872.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	310.838.055,00			-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	30.872.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang Ditasiliasi Kemitraannya				25 Unit Usaha	85.348.875,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-		30.872.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya				30 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perencanaan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				30 Unit Usaha	86.100.850,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya				30 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota														
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit Usaha	39.388.330,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	-	75%			-	2.974.541.545,00						74%	351.128.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendidikan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	2.974.541.545,00			-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implimentasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	351.128.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				30 Unit Usaha	10.157.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implimentasi perencanaan pembangunan daerah	-		8.870.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 Unit Usaha	27.123.945,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implimentasi perencanaan pembangunan daerah	-		23.689.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				40 Unit Usaha	2.827.010.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implimentasi perencanaan pembangunan daerah	-		222.259.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				10 Orang	31.443.000,00	Kab. InDRAMIRI Hilir, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-		27.452.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Mikro yang Tertaslitasi				60 Unit Usaha	50.281.000,00	Kab. InDRAMIRI Hilir, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-		43.913.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				5000 Unit Usaha	28.526.600,00	Kab. InDRAMIRI Hilir, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-		24.945.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
s.	2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	-	68%			-	224.000.000,00						66%	205.078.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	224.000.000,00				Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	205.078.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Tertaslitasi				15 Unit Usaha	224.000.000,00	Kab. InDRAMIRI Hilir, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	-		205.078.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		<b>J U M L A H</b>							<b>10.703.712.000,00</b>						<b>6.573.747.000,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Indragiri Hilir sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir serta target dan sasaran pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dioperasionalkan melalui RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Dengan adanya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir, maka penetapan prioritas pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan upaya mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai wadah kolektif yang efisien dan efektif untuk pemberdayaan yang saling bersinergi dengan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif dan berdaya guna serta mempunyai nilai tambah secara ekonomis.